

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz, Abdul. *Ekonomi Politik Monopoli Negara Pelayanan Kapitalis & Kuasa Korporasi Dalam Bisnis Pasar Modern*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, November 2011.
- Black's Law Dictionary. Dikutip dalam Asri Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Elips. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Elips, 1997.
- Fahmi, Andi, et. Al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, GTZ, Jakarta.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermansyah. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PR Raja Grafinfo Persada, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, Andi Fahmi, et al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- Marwan, Awaludin. *Teori Hukum Kontemporer: Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.



ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Boston: Little Brown and Company, 1992.

Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Supriyatno, Bambang. *Praktik Kartel dalam Industri Penerbangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2021.

Taufik, Ahmad. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Penerbangan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2021.

Taufik, Ahmad. *Praktik Kartel dalam Industri Penerbangan: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2020.

Whish, Richard, and David Bailey. *Competition Law*. Oxford University Press, 2015.

Wibowo, Agus. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2017.

B. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis

Antoni, Veri. "Penegakan Atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019).

Firmansyah, Andi. "Dampak Praktik Kartel dalam Industri Penerbangan Terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi* 15, no. 3 (2019).

Ikhbal, Muhammad Prana. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Perjanjian Penetapan Tarif Jasa Pengangkutan PT Garuda Indonesia dengan Maskapai Penerbangan Swasta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

Ilyas, Muhammad. "Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng." Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023.

Mezak, M.H. "Jenis, Metode & Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 3 (2016).

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.



Pambudi, Agustiar Galih. “Pelanggaran Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat oleh Perusahaan Ban Indonesia.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018.

Paparang, Joshua Anggelito. “ Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” *Jurnal Lex Privatum* 7, No.7 (Oktober-Desember 2019).

Primandhika, Made Prasasta, dan I Gede Artha. “Analisis Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel di Indonesia.” Makalah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, t.t.

Sari, R., dan H. Nugroho. “Efektivitas Regulasi Kartel di Indonesia: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum & Ekonomi* 1, no. 20 (2020).

Setiawan, Andri. “Praktik Kartel dalam Industri Penerbangan Indonesia: Dampak terhadap Persaingan Sehat.” *Jurnal Hukum Ekonomi* 22, no. 1 (2020).

Sirait, Ningrum Natasya. “Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha Dalam Konteks UU No.5 Tahun 1999.” *Jurnal Hukum Bisnis* 19 (Mei-Juni 2002).

Smith, Jane. “Kesadaran Hukum Konsumen dalam Menghadapi Praktik Kartel di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi* 16, no. 2 (2021).

Sulistiono, Nur. “Kartel yang dilakukan oleh Maskapai Penerbangan (Studi Putusan KPPU Nomor : 15/KPPU-I/2019).” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Veteran Negeri Jakarta, Jakarta, 2021.

Suryani, Rina. “Kartel dan Dampaknya pada Industri Penerbangan Domestik di Indonesia.” *Jurnal Hukum Persaingan Usaha* 12, no. 1 (2020).

Toha, Kurnia. “Implikasi UU No.5 Tahun 1999 terhadap Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum Bisnis* 19 (2002).

Trianah, Maira. “Pengaruh Sejarah Perkembangan Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara di Indonesia serta Dampaknya terhadap Masyarakat.” *Jurnal UMJ*, 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, mengubah Pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Nomor 04 Tahun 2010.* Jakarta: KPPU, 2010

Indonesia. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*

Indonesia. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.*

D. Laporan dan Dokumentasi Pemerintah

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). *Pedoman Edukasi Konsumen: Hak dan Perlindungan Konsumen.* Jakarta: BPKN, 2020.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). *Transparansi Penegakan Perldindungan Konsumen.* Jakarta: BPKN, 2022.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). *Mekanisme Gugatan Kolektif dan Perlindungan Konsumen.* Jakarta: BPKN, 2022.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri,* 2019.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri,* 2020.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Laporan Pengaturan Tarif dan Kompetisi Industri Penerbangan.* Jakarta: Kemenhub, 2023.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Laporan Koordinasi Penegakan Hukum Industri Penerbangan.* Jakarta: Kemenhub, 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.* Jakarta: KPPU, 2019.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan Tahunan KPPU 2020: Analisis Praktik Kartel dalam Berbagai Sektor Ekonomi.* Jakarta: KPPU, 2020.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan Tahunan KPPU 2020: Praktik Kartel dalam Sektor Penerbangan.* Jakarta: KPPU, 2020.



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Pedoman Umum Penanganan Kasus Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU, 2020.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Kartel di Indonesia*. Jakarta: KPPU, 2021.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan Tahunan 2022: Penegakan Hukum Kartel di Indonesia*. Jakarta: KPPU, 2022.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan Tahunan KPPU 2023: Kewenangan dan Tugas KPPU*. Jakarta: KPPU, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Kasasi Nomor 1811K/Pdt.Sus-KPPU/2022*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2022.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *The OECD Competition Law and Policy Roundtable on Leniency Programs*. Paris: OECD, 2012.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). *Laporan Survei Literasi Konsumen 2019-2020*. Jakarta: YLKI, 2020.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). *Laporan Penegakan Hukum Konsumen di Indonesia*. Jakarta: YLKI, 2022.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). *Laporan Perlindungan Konsumen dan Edukasi Publik*. Jakarta: YLKI, 2022.

E. Internet

CNBC Indonesia. “Sabar! Hasil Investigasi Dugaan Kartel Maskapai Segera Rilis.” *CNBC Indonesia*. Diakses pada 29 April 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190123131544-4-51984/sabar-hasil-investigasi-dugaan-kartel-maskapai-segera-rilis>

Heriani, Fitri Novia. “KPPU Sebut Kartel Tiket Pesawat Tidak Selalu Terkait Tarif.” *Hukum Online*. Diakses 29 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-sebut-kartel-tiket-pesawat-tidak-selalu-terkait-tarif-lt66052961cd099/?page=2>.

Hukum Online. “Diputus Bersalah oleh KPPU dalam Kasus Tiket Pesawat, ini Respons Lion Air.” Diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diputus-bersalah-oleh-kppu-dalam-kasus-tiket-pesawat--ini-respons-lion-air-lt5ef44d0491cd9/>

Lestari, Dini S. “Lonjakan Harga Tiket Pesawat di Liburan Lebaran: Apa Penyebabnya?” *Kompas*. Diakses pada 6 Oktober 2025. <https://www.kompas.com/ekonomi/tiket-pesawat>

Pratama, Akhdi Martin, dan Erlangga Djumena. “YLKI Duga Ada Kartel dalam Kenaikan Harga Tiket Pesawat.” *Kompas*, Diakses 29 April 2025.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Urgensi Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Kartel Tiket Pesawat Domestik di Indonesia

Jacinda Fitria Atha Kirana, Prof.M.Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

<https://money.kompas.com/read/2019/01/26/060400926/ylki-duga-ada-kartel-dalam-kenaikan-harga-tiket-pesawat>

Supermana, Rizki. “DPR Minta Kemenhub Evaluasi Harga Tiket Pesawat.” *Radio Republik Indonesia*. Diakses 4 Agustus 2025. <https://rri.co.id/nasional/1535203/dpr-minta-kemenhub-evaluasi-harga-tiket-pesawat#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta:%20Wakil%20Ketua%20Komisi,Kata%20Kunci:>

Tarnes, M Vareno. “Bongkar Kartel Dengan Leniency Program.” *Hukum Online*. Diakses pada 29 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bongkar-kartel-dengan-leniency-program-lt4d81f77e90173/?page=3>.

Tesis Hukum. “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” *TesisHukum.com*. Diakses 19 November 2021. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

F. Wawancara

Barok, Kamal. Wawancara dengan penulis, 20 Februari 2025, di Kantor KPPU Kanwil VII.